

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Selama Triwulan II Tahun 2026, perkembangan inflasi Kota Palopo menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas pangan bergejolak (volatile food). Pada April 2026 terjadi inflasi sebesar 0,47% (m-to-m), Mei mengalami deflasi sebesar 0,05% (m-to-m), dan Juni kembali mengalami inflasi sebesar 0,45% (m-to-m). Komoditas yang dominan memengaruhi perkembangan harga meliputi tomat, cabai, bawang merah, ikan kembung, minyak goreng, serta bahan bakar rumah tangga. Sementara itu, harga beras, gula pasir, minyak goreng bersubsidi (Minyakita), telur ayam ras, dan daging sapi relatif stabil sepanjang triwulan. Penurunan harga daging ayam ras, udang, dan beberapa komoditas perikanan pada periode tertentu turut menahan laju inflasi.

Ke depan, risiko inflasi diperkirakan masih berasal dari keterbatasan pasokan komoditas hortikultura akibat faktor cuaca dan musim panen, fluktuasi hasil perikanan karena kondisi cuaca dan gelombang laut, serta meningkatnya biaya distribusi yang dipengaruhi harga bahan bakar. Selain itu, karakteristik Kota Palopo sebagai daerah yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah menyebabkan harga komoditas strategis cukup sensitif terhadap gangguan distribusi dan produksi di daerah pemasok. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi 4K melalui peningkatan Gerakan Pangan Murah, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, pemantauan harga secara intensif, dan sistem peringatan dini (early warning system) untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi di Kota Palopo masih menghadapi beberapa permasalahan utama, yaitu terbatasnya pasokan komoditas pangan bergejolak (volatile food) seperti bawang merah, tomat, cabai rawit, dan ikan segar akibat pengaruh cuaca, musim panen, serta ketergantungan pasokan dari daerah lain. Fluktuasi produksi perikanan juga menyebabkan harga hasil perikanan tidak stabil. Selain itu, kenaikan biaya transportasi dan distribusi turut mendorong kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sebagai daerah non-penghasil, Kota Palopo masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan perubahan harga di daerah sentra produksi. Di sisi lain, pelaksanaan intervensi stabilisasi harga masih terbatas, antara lain frekuensi Gerakan Pangan Murah yang belum optimal, belum terealisasinya Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta pemanfaatan hasil pemantauan harga yang belum sepenuhnya berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dalam menentukan waktu pelaksanaan intervensi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Selama Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kota Palopo melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya yang dilakukan meliputi pemantauan harga dan stok komoditas strategis di pasar andi tadda, pusat niaga palopo, distributor, dan pangkalan LPG 3 kg, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian

Dalam Negeri, serta koordinasi dengan Perum Bulog, Pertamina, Hiswana Migas, dan perangkat daerah terkait. Selain itu, dilaksanakan penyaluran Bantuan Pangan pada 23 April 2026, Gerakan Pangan Murah Serentak pada 21 Mei 2026, serta Operasi Pasar LPG 3 kg pada 18 Juni 2026 di sembilan kecamatan sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan stabilitas distribusi barang kebutuhan pokok.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Palopo selama Triwulan II Tahun 2026 telah berjalan cukup baik melalui implementasi strategi 4K, yang diwujudkan melalui pemantauan harga dan stok komoditas strategis, pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, penyaluran Bantuan Pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Operasi Pasar LPG 3 kg. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan karena tekanan inflasi masih didominasi oleh gangguan pasokan komoditas hortikultura dan hasil perikanan yang berasal dari luar daerah. Selain itu, frekuensi Gerakan Pangan Murah masih terbatas, belum terealisasinya Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta pemanfaatan hasil pemantauan harga sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) belum optimal. Ke depan, diperlukan penguatan intervensi pada sisi pasokan dan distribusi, peningkatan intensitas stabilisasi harga, serta percepatan pelaksanaan KAD agar pengendalian inflasi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Perlunya meningkatkan intensitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara berkala berdasarkan hasil pemantauan harga komoditas strategis, memperkuat dukungan anggaran untuk kegiatan stabilisasi harga, serta segera merealisasikan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah sentra produksi guna menjamin ketersediaan pasokan pangan. Selain itu, perlu dikembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis data pemantauan harga untuk mempercepat pelaksanaan intervensi sebelum terjadi lonjakan harga. Sinergi antar anggota TPID bersama Perum Bulog, Pertamina, pelaku usaha, distributor, dan pemerintah daerah pemasok juga perlu terus diperkuat guna menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga, dan ketahanan pangan di Kota Palopo.